

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2017). Semakin tinggi pemahaman mengenai literasi keuangan akan berdampak semakin banyaknya masyarakat yang menabung dan berinvestasi, sehingga semakin tinggi pula potensi transaksi keuangan yang terjadi. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, serta dapat menciptakan pemerataan pendapatan.

Untuk meningkatkan keuangan masyarakat pelaksanaan edukasi sangat diperlukan, karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

1. *Well Literate* yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

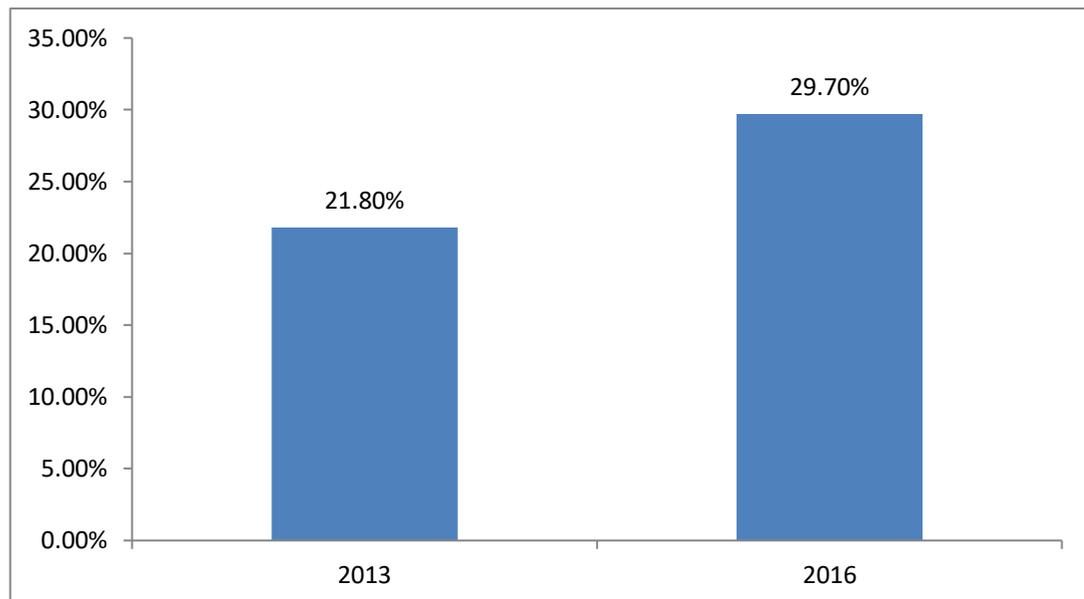
2. *Sufficient Literate* yaitu memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less Literate* yaitu hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not Literate* yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

TABEL 1.1
Literasi Keuangan Penduduk Indonesia (2013)

Indeks Literasi Keuangan	Persen (%)
<i>Well Literate</i>	21,84
<i>Sufficient Literate</i>	75,69
<i>Less Literate</i>	2,06
<i>Not Literate</i>	0,41

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

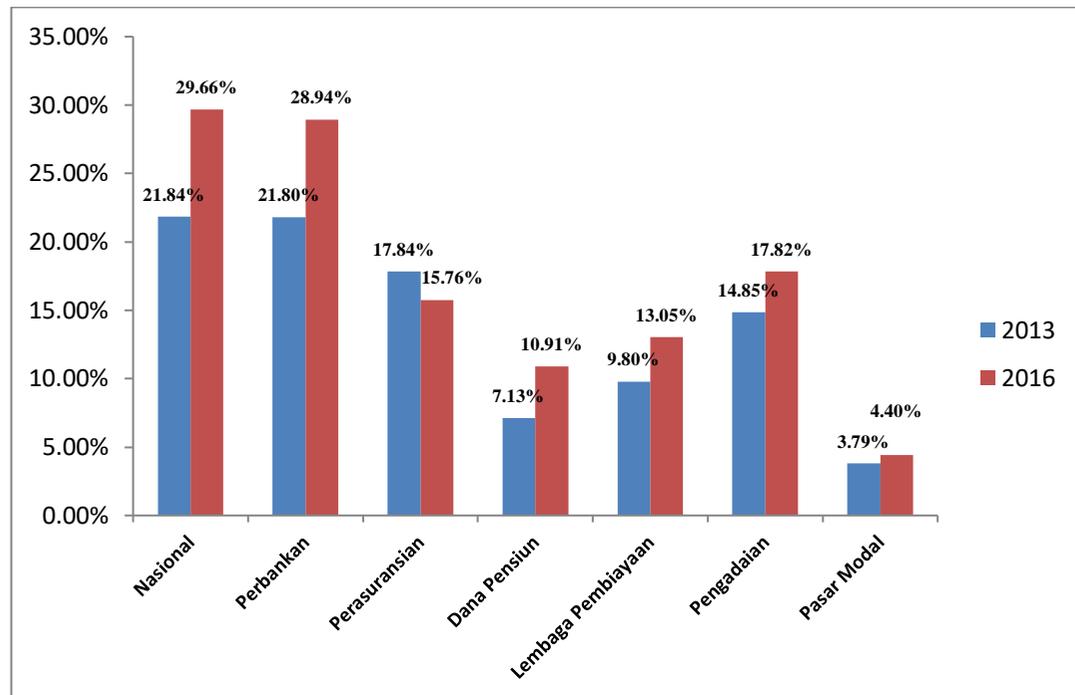
Berdasarkan tabel 1.1 kategori tingkat pengetahuan literasi keuangan penduduk Indonesia termasuk dalam kategori *Sufficient Literate* sebesar 75,69 %, artinya memiliki pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Hal ini menunjukkan cukup baiknya pengetahuan masyarakat tentang literasi keuangan, tetapi hal ini belum merata karena masih cukup banyak masyarakat yang belum mengerti tentang lembaga, produk, manfaat dan resiko terkait keuangan tersebut (Hareva, 2019).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017

GAMBAR 1.1 **Indeks Literasi Keuangan Tahun 2013 dan 2016**

Survei Nasional Literasi Keuangan masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2013 hanya sebesar 21,8 % yang artinya dari setiap 100 penduduk hanya sekitar 22 orang yang termasuk *well literate*. Namun pada tahun 2016 Indeks Literasi Keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari 21,8% di tahun 2013 menjadi 29,7% di tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia untuk mengoptimalkan uang untuk kegiatan produksi belum maksimal. Selain itu, masyarakat Indonesia juga belum mengetahui dengan baik macam-macam produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal yang tertarik dengan tawaran untuk berinvestasi lain yang berpotensi akan merugikan mereka.



Sumber: Otoritas Jasa keuangan (OJK), 2016

GAMBAR 1.2
Indeks Literasi Keuangan Penduduk Indonesia (Sektoral)
Tahun 2013 dan 2016

Berdasarkan gambar 1.2, pemanfaatan produk lembaga keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, pada tahun 2013 produk perbankan sebesar 21,80%, dan pada tahun 2016 produk perbankan meningkat menjadi 28,94%. Meski tingkat literasi tahun 2013 dan 2016 mengalami peningkatan namun secara umum tingkat literasi keuangan pada produk lembaga keuangan masih berada di bawah 20%. Pengetahuan tentang literasi keuangan menjadi sangat penting dan dibutuhkan di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan zaman yang kini kaya akan teknologi, masyarakat harus pandai dalam mengelola keuangannya dan tidak hanya memiliki pengetahuan akan keuangan saja, tetapi dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan akan pasar uang yang ada saat ini. Selain berpengaruh bagi

keuangan juga berpengaruh terhadap pengelolaan usaha, bisnis dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dikelolanya. Menurut Aribawa (2016), tingkat literasi keuangan yang baik akan menciptakan manajemen keuangan yang baik, hal ini akan meningkatkan kinerja dari usaha, bisnis dan UMKM tersebut. Menurut Yusuf dan Djuwita (2018) *financial behaviour* mempengaruhi perkembangan usaha, bisnis dan UMKM.

TABEL 1.2
Data Perkembangan UMKM di Indonesia
Tahun 2012-2017 (dalam Unit)

Tahun	Usaha Mikro (UMi)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)	Jumlah
2012	54.559.969	602.195	44.280	55.206.444
2013	55.856.176	629.418	48.997	56.534.592
2014	57.189.393	654.222	52.106	57.895.721
2015	58.521.987	681.522	59.263	59.262.772
2016	60.863.578	731.047	56.551	61.651.177
2017	62.106.900	757.090	58.627	62.922.617

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 2018.

Berdasarkan tabel 1.2, perkembangan UMKM di Indonesia cukup pesat yaitu dari tahun 2012-2017 mencapai 7.716.172 unit, atau sekitar 13,98%. Selain perkembangan yang terus meningkat dari segi jumlah, kontribusi dalam perekonomian nasional cukup besar. Menurut data dari BPS yang ditunjukkan pada tabel 1.2 tahun 2017 UMKM memiliki nilai 5.425.414,7 Milyar Rupiah, atau sekitar 57,08% dari PDB (Produk Domestik Bruto) atas harga konstan 2000.

TABEL 1.3
Data Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2012-2017

Tahun	Usaha Mikro (UMi)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)	Jumlah
2012	761.228,80	261.315,80	346.781,40	1.369.326,00
2013	790.825,60	294.260,70	366.373,90	1.451.460,20
2014	807.804,50	342.579,20	386.535,10	1.536.918,80
2015	848.985,00	395.426,00	411.019,00	1.655.430,00
2016	2.736.613,70	1.123.131,80	1.311.318,00	5.171.063,60
2017	2.856.607,80	1.191.871,10	1.376.935,80	5.425.414,70

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik) 2018.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Gunartin (2017) menunjukkan bahwa perkembangan UMKM menjadi hal yang penting dalam pembangunan pada bidang perekonomian di Indonesia, oleh sebab itu perkembangannya menjadi pilar penting dalam perekonomian.

UMKM juga berpengaruh pada perekonomian daerah-daerah di Indonesia, salah satunya daerah Istimewa Yogyakarta, menurut kepala BPS D.I.Y, Bapak Priyono, dalam tribun Jogja, industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi, dan makanan minuman, konstruksi, dan perdagangan adalah penyumbang terbesar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) D.I.Y, kontribusinya mencapai 53,40%. Keberlangsungan UMKM ini menjadi sangat penting bagi sektor perekonomian.

فَضِّلِ اللَّهَ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ مِنَ وَابْتَغُوا
قُضِيَتْ فَإِذَا

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk mencari rezki dan usaha yang halal) dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS al-Jumu’ah:10).

Manajemen keuangan didalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu faktor yang akan menentukan keberlangsungannya. Dalam siaran pers OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2017, OJK menjadikan UMKM sebagai salah satu sasaran dari program strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Tujuan utama dari program tersebut yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (*well literate*), sehingga dapat memilih dan memanfaatkan produk maupun jasa keuangan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, minimnya pengetahuan akan literasi yang rendah akan berkurang dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Literasi keuangan yang baik akan menjadikan manajemen yang baik juga untuk UMKM, dengan harapan akan berpengaruh terhadap perkembangannya.

TABEL 1.4
Data Perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2017

Tahun	Usaha Mikro (UMi)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)	Jumlah
2012	111.591	50.999	30.801	193.391
2013	111.912	51.459	31.121	194.492
2014	120.725	55.176	33.326	209.227
2015	125.863	57.412	34.737	218.012
2016	130.525	59.655	36.031	226.211
2017	135.799	62.042	37.472	235.313

Sumber: Bappeda D.I. Yogyakarta 2017.

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2017, dengan berbagai macam bidang yang tersebar ke dalam lima kabupaten. Dilihat dari jumlah UMKM yang berada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2012-2017 selalu mengalami kenaikan pada tiap tahunnya. Unit Usaha Mikro menjadi penyumbang angka terbesar dalam UMKM di daerah Istimewa Yogyakarta.

TABEL 1.5
Data UMKM di Kabupaten Sleman
Tahun 2017

No	Sektor/Bidang Usaha	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Agro Bisnis	1468	235	4	1707
2	Dagang Bahan Bangunan	357	152	22	531
3	Dagang Fashion	416	48	3	467
4	Dagang Kuliner	6143	305	22	6470
5	Industri Bahan Bangunan	658	235	18	911
6	Industri Fashion	1065	102	6	1173
7	Industri Kuliner	1709	230	8	1947
8	Industri Lainnya	176	30	0	206
9	Jasa Lainnya	3563	533	53	4149
10	Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor	1340	343	49	1732
11	Kerajinan	2408	438	19	2865
12	Pendidikan	42	9	2	53
13	Perdagangan Lainnya	7352	1210	51	8613
14	Teknologi dan Informasi	331	61	4	396
Jumlah		27028	3931	261	31220

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman (2017).

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kabupaten Sleman terdapat 31.220 UMKM dengan jumlah 27.028 usaha mikro, 3.931 usaha kecil dan 261 usaha menengah. Sedangkan pada sektor kerajinan menduduki rangking ke empat tertinggi setelah sektor perdagangan lainnya, dagang kuliner, dan jasa lainnya. Yaitu sebesar 2.408 pada usaha mikro, 438 pada usaha kecil dan 19 pada usaha menengah di tahun 2017. Menurut sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman Endah Sri

Widiastuti (2018) tercatat puluhan ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sleman sekitar 27.381 UMKM dengan jumlah usaha mikro 23.275, usaha kecil 3.681 dan usaha menengah 425.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berupaya menekan angka kemiskinan. Salah satunya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang banyak tumbuh di wilayah setempat. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Sleman Pustopo sektor UMKM memiliki peran dan potensi besar dalam menyumbang penurunan angka kemiskinan, baik itu melalui nilai produk yang dihasilkan maupun dari penyerapan tenaga kerja. banyaknya jumlah UMKM ini bisa menyerap tenaga kerja, setidaknya sebanyak 70 ribu tenaga kerja yang bisa terserap. Asumsinya satu UMKM ada dua orang tenaga kerja, dan penghasilannya UMR, maka bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sleman tidak banyak yang mengetahui dan kurang untuk mengelola keuangan. Banyak dari pelaku UMKM yang kurang memperhatikan dengan seksama tata cara mengelola keuangannya dan mereka juga jarang melakukan investasi, tabungan dan mengasuransikan tempat usahanya. Hal ini antara lain juga disebabkan oleh keunikan dari UMKM, yang umumnya tidak memiliki informasi yang terorganisir mengenai kondisi keuangan, pangsa pasar, dinamika kompetisi dan jejak rekam manajemen. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dalam mengelola keuangan adalah dengan menggunakan literasi keuangan.

Menurut Jamarudin berdasarkan data OJK pada 2016, ada 30 persen UMKM yang sudah memiliki pemahaman mengenai literasi keuangan dengan baik. Namun, di lapangan berdasarkan laporan baru terdapat 20 persen yang paham literasi keuangan. Keberadaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) DIY menjadi mediator bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat meningkatkan kemampuan manajerial keuangan bagi usahanya. Salah satu kendala manajemen usaha bagi pelaku UMKM yakni masih belum memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha, sehingga dengan diberlakukan seperti itu maka usaha mereka tidak akan berkembang dengan baik serta dapat mempengaruhi kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman. Pentingnya literasi keuangan pada pengrajin di Kabupaten Sleman agar terhindar dari Risiko keuangan dan memanfaatkan peran dari lembaga keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang analisis pengaruh literasi keuangan (*financial literacy*) terhadap Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman demi mencapai pemahaman mengenai mengelola keuangan. Penelitian ini diberi judul “*Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Sektor Kerajinan di Kabupaten Sleman.*”

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus dalam penelitian kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan yang berada di Kabupaten Sleman

C. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti mengenai tingkat literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
2. Bagaimana pengaruh sikap dalam menggunakan uang berpengaruh terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
3. Bagaimana pengaruh perilaku dalam menggunakan uang terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
4. Bagaimana pengaruh menabung dan meminjam terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
5. Bagaimana pengaruh investasi terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
6. Bagaimana pengaruh asuransi terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap dalam menggunakan uang berpengaruh terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku dalam menggunakan uang terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui pengaruh menabung dan meminjam terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
5. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.
6. Untuk mengetahui pengaruh asuransi terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, manfaat penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan di Kabupaten Sleman yaitu:

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan dan pengelolaan keuangan.
2. Pemerintah dan lembaga keuangan terkait sebagai referensi agar dapat lebih aktif dalam memberikan edukasi mengenai lembaga keuangan terhadap kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada sektor kerajinan.
3. Sebagai referensi akademik dalam mengkaji perkembangan literasi keuangan pada penelitian selanjutnya.